

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus ke arah yang ingin dicapai, pembangunan terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. (Lincoln Arsyad, 1988:16).

Pembangunan nasional merupakan proses yang berkesinambungan dan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada sehingga pelaksanaannya dapat berjalan seimbang, selaras dan saling menunjang antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Pembangunan nasional ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga potensi yang dimiliki daerah dapat digali untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Dalam melaksanakan pembangunan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sumber biaya tersebut berasal dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Untuk mencapai penerimaan dalam negeri yang maksimal, maka masing-masing pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah secara maksimal sesuai dengan prinsip ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara bertahap, semakin banyak dilimpahkan pada daerah, dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada

pemerintah daerah. Peranan keuangan akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih efektif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Demikian juga daerah dituntut untuk meningkatkan kesiapan aparatur daerah menghadapi masalah pembangunan yang lebih kompleks lagi. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 79 adalah sebagai berikut : (Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, 2000 : 34)

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil restribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka penyediaan dana untuk pembangunan daerah yang semakin meningkat, maka pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak/non pajak

3. Sumbangan/bantuan

4. Sisa hasil usaha (BUMD) tahun yang lalu.

Otonomi daerah berarti diberikannya wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pemerintah daerah dituntut untuk mandiri. Juga tambahan tugas untuk pemerintah daerah karena dalam usahanya meningkatkan pembangunan daerah selain dibutuhkannya dan bagi pelaksanaan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang juga diperlukan, dan sumber daya manusia yang dimiliki juga harus berkualitas. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah selalu menitik beratkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi sumber retribusi, hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan langsung kepada masyarakat dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber dana daerah. Sehingga diharapkan peningkatan pelayanan serta penerimaan pungutan retribusi ini dapat selalu terpacu dimasa yang akan datang.

Sektor retribusi daerah pungutannya berdasar atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah dan pelaksanaan pemungutannya dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarannya.

Pengumpulan dan pengawasan sumber dana harus efisien seperti tertuang dalam GBHN yang berbunyi :

“Pendapatan daerah ditingkatkan melalui penggantian sumber dana asli daerah antara lain dari pajak daerah, pungutan daerah, perusahaan daerah, disamping bantuan pusat, pinjaman daerah dan investasi di daerah dengan jalan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan

pendapatan yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (GBHN Republik Indonesia, : 1997).

Dengan demikian kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan anggarannya terhadap pendapatan asli daerah merupakan usaha yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai setidaknya biaya operasional dan permintaan daerah (anggaran rutin).

Dilihat dari struktur dan jenis-jenis pajak daerah pada saat ini, terlihat bahwa pada dasarnya daerah mempunyai bermacam-macam jenis pajak dan retribusi tetapi pada kenyataannya sebagian besar dari pajak dan retribusi tersebut kurang mempunyai potensi yang tinggi dan retribusi yang tidak diterima PEMDA. Struktur, potensi pajak dan retribusi di daerah kurang berkembang serta kurang perannya perusahaan sebagai sumber pendapatan daerah.

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah distribusi. Yang dimaksud retribusi adalah :

“Suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.” (Suparmoko, M, 1990 : 94)

Retribusi pasar lebih sekedar pengganti jasa terhadap barang yang disediakan oleh pemerintah, istilah sekedar ini berarti retribusi tersebut tidak ditujukan untuk menutup biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk pembiayaan pasar. Pasar sebagai tempat penjualan harus terawat baik, tidak hanya bermanfaat bagi penjual di pasar tetapi bermanfaat pula bagi masyarakat keseluruhan. Retribusi bukan merupakan seluruh “harga” jasa atau barang

yang dinikmati oleh pembayaran retribusi. Dengan latar belakang bahwa retribusi mampu memberikan peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka penyusunan akan mengangkat judul : **“PERANAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 1992/1993-2001/2002.”**

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Klaten
Tahun 1992/1993-2002

Tahun	PAD (Rp)
1	3
1992/1993	4.161.487.829
1993/1994	4.724.783.687
1994/1995	5.665.515.313
1995/1996	6.060.622.068
1996/1997	6.209.151.965
1997/1998	6.941.367.697
1998/1999	7.469.951.411
1999/2000	7.901.972.074
2000	6.598.253.386
2001	13.831.407.402
2002	17.534.903.154

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

1.2. Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah :

1. Seberapa besar peranan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari pemungutan retribusi pasar ?
3. Seberapa besar laju pertumbuhan retribusi pasar dan bagaimana elastisitasnya terhadap laju pertumbuhan PDRB dan jumlah penduduk ?

1.3. Pembatasan Masalah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Sedangkan retribusi daerah sendiri terdiri dari retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi kebersihan, retribusi pariwisata. Retribusi pasar sebagai sumber retribusi daerah yang merupakan salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah. Agar lingkup permasalahan di dalam penelitian ini tidak menjadi luas maka penulis hanya membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten pada kurun waktu tahun 1992/1993-2002.
2. Variabel perbandingan menggunakan PDRB dan jumlah penduduk.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui peranan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pemungutan retribusi pasar ?
3. Untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan retribusi pasar dan bagaimana elastisitasnya terhadap PDRB dan jumlah penduduk ?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang retribusi pasar adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah khususnya dinas pasar sebagai bahan masukan tentang upaya untuk meningkatkan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah.
2. Bagi ilmu ekonomi sebagai bahan masukan mengenai kebijakan keuangan daerah yang ada hubungannya dengan retribusi pasar.
3. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jurusan ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Daerah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Klaten

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder, terutama data-data resmi yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, BAPPEDA, serta kantor BPS. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data deret waktu tahunan dalam waktu 11 tahun terakhir.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul guna membuktikan hipotesis digunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif.

a. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisa untuk menguji dan menilai setiap data yang berhasil dikumpulkan, didasarkan pada perhitungan matematika dan statistik yang sifatnya pasti, yang termasuk dalam metode ini adalah :

- Analisis Efisiensi

Yaitu untuk mengetahui rasio besarnya biaya pemungutan retribusi pasar yang dikeluarkan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar yang bersangkutan, dengan rumus (Nick Devas, dkk, 1989 : 146) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Restribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Restribusi Pasar}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efisiensi menghasilkan angka atau prosentase yang kecil, atau rendah maka hipotesis yang menyatakan

bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar mempunyai efisiensi yang cukup baik terbukti.

Menilai besar kecilnya tingkat efisiensi sesuai dengan Perda pasal 5 apabila diatas 5% maka tidak efisien sebaliknya dibawah 5% efisien

- Analisis Efektivitas

Yaitu untuk mengukur rasio antara realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap target penerimaan retribusi pasar, dengan rumus (Nick Devas, dkk., 1989 : 146) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100 \%$$

Apabila hasil perhitungan efektivitas mendekati 100%, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar mempunyai efektifitas yang cukup baik terbukti.

- Analisis Elastisitas

Elastisitas digunakan untuk mengetahui besarnya derajat kepekaan perubahan retribusi pasar akibat adanya perubahan indikator-indikator ekonomi lain seperti PDRB dan jumlah penduduk.

Rumus elastisitas dapat ditulis sebagai berikut (Dominick Salvatore, 1996 : 47) :

$$E = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X}$$

Dimana :

E = Elastisitas

Y = Variabel tidak bebas atau dependen (realisasi penerimaan retribusi pasar)

ΔY = Perubahan Y

X = Variabel bebas atau independen (PDRB dan jumlah penduduk)

ΔX = Perubahan X

Dalam perhitungan elastisitas akan diperoleh tiga kemungkinan yaitu :

- a) $E > 1$, Elastis artinya apabila variabel bebas (PDRB dan jumlah penduduk) mengalami perubahan sebesar 1 % maka variabel tidak bebas (realisasi penerimaan retribusi pasar) mengalami perubahan lebih besar dari 1 %.
- b) $E < 1$, inelastis artinya apabila variabel bebas (PDRB dan jumlah penduduk) mengalami perubahan sebesar 1 % maka variabel tidak bebas (realisasi penerimaan retribusi pasar) mengalami perubahan lebih kecil dari 1 %.
- c) $E = 1$, Unitary elastis artinya apabila variabel bebas (PDRB dan jumlah penduduk) mengalami perubahan sebesar 1 % maka variabel tidak bebas (realisasi penerimaan retribusi pasar) mengalami perubahan 1 %.

Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB (%) dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{(n - n_{.1})}{n_{.1}} \times 100\%$$

n = tahun sekarang

n.₁ = tahun sebelumnya

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai arah pengembangan otonomi daerah berdasarkan UU No.25 Tahun 2000 uraian mengenai PAD dan retribusi pasar.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi letak geografis, luas wilayah, kondisi penduduk, kondisi perekonomian daerah Kabupaten Klaten.

BAB IV ANALISA DATA

Dalam bab ini berisi pembahasan, uraian analisis PAD Kabupaten dari segi retribusi pasar berdasarkan pada data yang sudah diperoleh dan metode analisis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari analisis ini, yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dan untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan merujuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Departemen Keuangan, RI 1998 : 352). Dengan Pendapatan Asli Daerah yang kuat maka akan terwujud otonomi daerah yang mantap, karena dapat membiayai keperluan daerah dari penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

2.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata oleh daerah.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Bagian laba BUMD merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD, yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya.

4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah

Adalah penerimaan dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi pajak. Misalnya : pertanian, peternakan, kesehatan dan lain-lain.

5. Penerimaan Lain-lain

Adalah penerimaan selain digambarkan diatas, yang termasuk rincian ini antara lain : hasil penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang diterima

oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro dan penerimaan lain-lain yang sah.

2.1.3. TolakUkur Keberadaan Pendapatan Asli Daerah

Penilaian keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara khusus belum ada. Cara menilai pendapatan asli daerah dilakukan dengan melihat jalur dari pos-pos yang terdapat dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dicerminkan dari pos penerimaan retribusi pasar. Ukuran penilaiannya adalah sebagai berikut (Nick Devas, 1989 : 61) :

1. Hasil

Suatu penerimaan daerah khususnya retribusi daerah memadai tidaknya hasil retribusi daerah dengan berbagai layanan yang dibiayai.

2. Kepekaan

Jangan sampai perubahan jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian menyebabkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan-pendapatan daerah menjadi kurang berarti.

3. Keadilan

Dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah harus bersifat adil, yaitu harus jelas dasar dan kewajibannya.

4. Kemampuan melaksanakan

Dalam menentukan sumber penerimaan daerah khususnya retribusi daerah, haruslah dapat dilaksanakan terutama dari sudut tata usaha.

5. Kecocokan

Sebagai sumber penerimaan daerah jadi harus jelas undang-undang atau peraturannya.

2.1.4. Otonomi Daerah (UU No. 25 Tahun 2000)

Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 25 tahun 2000 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten.

Dalam undang-undang ini daerah propinsi adalah otonomi dan sekaligus wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan daerah kota. Sehingga otonomi propinsi dan daerah kabupaten serta daerah kota tidak mempunyai hubungan hirarki. Dengan pengalaman otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata bertanggung jawab dengan penekananan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari hak, maka dalam UU No. 25 Tahun 2000 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten.

kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab.

2.2. Retribusi Daerah

2.2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Disamping itu ada beberapa pengertian retribusi yaitu

1. Retribusi secara umum adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena seseorang atau badan hukum menggunakan, jasa atau barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Soetrisno, PH, 1983 : 139).
2. Retribusi adalah uraian kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan disini bersifat ekonomi karena siapa saja yang tidak mendapat jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran ini (S. Munawir, 1990 : 4).

Dari beberapa pengertian retribusi diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud jasa balik disini adalah apabila seseorang atau badan usaha dikenakan retribusi secara paksa maka ia memperoleh imbalan secara langsung yang telah disediakan dengan

tempat dan keadaan, dengan harapan penarikan retribusi ini tidak memberatkan para wajib retribusi atau masyarakat.

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari obyeknya retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar nyata, tidak dibuat-buat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian retribusi tersebut tidak boleh dipungut terlampaui tinggi dan tidak boleh memutasi keluar masuknya barang atau pengangkutan barang kedalam dan keluar daerah bersangkutan.

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil dalam mengisi keuangan daerah. Sedangkan bagi masyarakat, hal ini merupakan beban karenanya peraturan dan retribusi daerah perlu pengesahan lebih dulu oleh penguasa dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam Undang-undang.

Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Restribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah

Dalam undang-undang No.34 tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta retribusi bahan galian golongan C dikategorikan sebagai pajak.

Termasuk golongan dan retribusi daerah adalah :

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sesuai kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
3. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian untuk kepada desa dan penetapannya dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi menempati urutan kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh karena itu peranannya menjadi penting sekali bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutinnya.

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Retribusi Daerah

Retribusi sebagai salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah dimaksudkan dapat memasukkan dana ke kas daerah sebanyak-banyaknya guna membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga kestabilan ekonomi yang mantap dapat tercapai karena laju pertumbuhan ekonomi yang layak dapat dipertahankan (M. Suparmoko 1990 : 260).

Sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal, retribusi daerah mempunyai beberapa kemampuan strategis yang mencerminkan manfaat dari retribusi itu sendiri. Manfaat-manfaat tersebut yaitu :

1. Retribusi dapat meningkatkan kemampuan dalam pembiayaan Pendapatan Asli Daerah
2. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Agar retribusi dapat berfungsi secara efisien dan efektif maka tidak harus memperhitungkan secara ekonomi dan fisik saja, tetapi harus ada kesadaran dan peran aktif yang cukup tinggi dari masing-masing atau masyarakat sebagai wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi pembayaran retribusi atas jasa yang telah digunakan.

2.2.3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi pasar

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran serta dalam pembiayaan pembangunan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada tingkat kabupaten.

Dasar hukum dalam mengadakan pemungutan retribusi sebagai sumber keungan daerah berpedoman pada:

1. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah dibuat dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000
2. Undang-undang nomor 19 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
3. Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan, keungan antar pemerintah pusat dan daerah.

4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal daerah.
5. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom.
6. Peraturan pemerintah tahun 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah

Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Pasal 24 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa (undang-undangan, 1997 : Pasal 24) :

1. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 berlaku surut dengan retribusi adalah retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu. Adapun jenis-jenis jasa umum adalah (Peraturan Pemerintah RI, 1997 : Pasal 2) :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Kebersihan
3. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

4. Retribusi Pemakaman dan Penguburan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pasar
7. Retribusi Air Bersih
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11. Retribusi Penggantian Kabel Perikanan.

Sedangkan jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah (Peraturan Pemerintah RI, 1997 : Pasal 3) :

1. Retribusi Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pertokoan/Grosir
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Retribusi Tempat Penitipan Anak
6. Retribusi Penginapan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
10. Retribusi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Produksi Usaha Daerah.

Sedang jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah (Peraturan Pemerintah RI, 1997 : Pasal 4) :

1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4. Retribusi Izin Tempat Bangunan
5. Retribusi Trayek.

2.3. Retribusi Pasar

2.3.1. Pengertian Retribusi Pasar

Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli (Boediono, 1991 : 43).

Sedangkan dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pasar adalah tempat dimana setiap terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga yang dimaksud pasar disini adalah pasar-pasar yang ada di Wilayah ~~Tingkat~~ Kabupaten Klaten, termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.

Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten.

Jadi Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pelayanan atau pemberian pribadi atau badan hukum. Dengan adanya pasar maka orang akan dapat dengan mudah menemukan barang yang dibutuhkan. Begitu juga dengan menjual ia dapat memperdagangkan barang dagangannya dengan mudah.

2.3.2. Obyek Retribusi Pasar

Obyek retribusi pasar terdiri dari:

1. Komponen utama terdiri dari:
 - a. Lantai dasaran pada lahan
 - b. Lantai dasaran pada toko/kios
 - c. Lantai dasar pada los
 - d. Lantai dasaran pada luar los
 - e. Lantai dasaran luar pasar
 - f. Gudang
 - g. Kandang hewan
2. Komponen penunjang terdiri atas:
 - a. Kamar mandi/wc
 - b. Tempat parkir
 - c. Tempat bongkar muat
 - d. Kerekan barang
3. Komponen pendukung seperti tempat penitipan anak dan tempat pelayanan kesehatan berdasarkan pada peraturan pemerintah daerah

kabupaten Klaten nomor 7 tahun 1984 tentang pasar dan pemungutan retribusinya pada bab I pasal 1, obyek pasar adalah pelayanan penyediaan pasar yang berupa ruko, kios, los, dan halaman/peralatan yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang.

2.3.3. Subyek retribusi pasar

Subyek retribusi pasar adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, kios, los, dan halaman/peralatan yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan pedagang.

Adanya penetapan retribusi pasar di Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 1998 tentang retribusi pasar dan penerimaan pasar telah disesuaikan dengan peraturan daerah yang sebelumnya sudah mengalami perubahan-perubahan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa peraturan daerah ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Maka untuk keperluan tersebut pemerintah mengambil kebijakan dengan meninjau kembali peraturan daerah untuk disempurnakan.

Obyek yang dikendalikan atas retribusi pasar di Kabupaten Klaten adalah penggunaan tempat diseluruh lingkungan pasar (Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten, 1998 : Pasal 3) obyek retribusi pasar meliputi tempat di seluruh kios, halaman pasar dan fasilitas lain berupa kebersihan tidak termasuk dalam perhitungan

retribusi pasar namun merupakan penerimaan pasar adalah penggunaan fasilitas bongkar muat, penggunaan WC, dagangan keliling, retribusi hewan dan retribusi barang yang termasuk ke pasar tidak tetap.

Yang dimaksud dengan tempat dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar. Kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup, sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpanan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok atau kayu dilengkapi dengan pintu. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas sehingga mudah dilihat dan dimengerti oleh semua yang berkepentingan.

Untuk menjadi pedagang pasar menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1998⁴ harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan dan surat pernyataan kesanggupan untuk berdagang di dalam atau di kawasan pasar yang ditunjukkan kepada daerah. Membayar biaya administrasi ongkos ganti cetak dan biaya pelimpahan hak pengguna komponen utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang kartu bukti yang sudah menjadi pedagang pasar berkewajiban untuk :

- a. Membayar retribusi secara harian, atas penggunaan tempat dasaran
- b. Membayar biaya administrasi serta pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.4. Tarif Retribusi Pasar

Penetapan tarif retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi :

1. Pasar dibiayai dengan kegiatannya dibedakan :
 - a. Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para pedagang dan pembeliannya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dengan tingkat pelayanan terbatas.
 - b. Pasar modern adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembeliannya dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk eceran atau grosir dalam waktu dengan tingkat pelayanan yang lebih luas.
2. Pasar dari jenis dagangannya dibedakan :
 - a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.
 - b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

3. Pasar ditinjau dari klasifikasinya dibedakan
 - a. Pasar buka tiap hari
 - b. Pasar buka 2 kali tiap 5 hari pasaran
 - c. Pasar buka 1 kali tiap 5 hari pasaran.

Besarnya tarif retribusi pasar untuk tiap-tiap daerah dapat bervariasi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku pada tiap-tiap daerah pemungut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.974/1328/2001 tentang tarif retribusi persewaan toko/kios atau dalam kekuasaan pemerintahan daerah kabupaten Klaten, bahwa yang menjadi obyek retribusi pasar adalah penggunaan tempat dasaran dilingkungan pasar.

2.5. Pengelolaan Pasar

Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar. Pengelolaan pasar tersebut meliputi fisik dan kegiatan, yang meliputi :

1. Menata Pedagang
2. Menata Kawasan
3. Mengadakan kegiatan ekonomi dalam pasar dengan suatu pola pengelolaan yang memadai.

Pengelolaan pasar pada pasar daerah dikelola oleh Dinas Pasar, sehingga dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pasar, pemerintah wajib :

1. Menjaga kebersihan
2. Menyediakan air bersih untuk umum dan keperluan lain
3. Menyediakan kamar mandi/WC umum.

Untuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pungutan retribusi dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pasar sanksi pendapatannya mempunyai tugas melaksanakan segala jenis pengganti retribusi yang ada dilingkungan pasar dan diluar pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Efektivitas, Efisiensi, Elastisitas

Ada tiga tolok ukur yang dipakai untuk menilai kemampuan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu efektivitas, efisiensi dan elastisitas. Untuk menilai potensi retribusi pasar sebagai penerimaan daerah yaitu elastisitas, sedangkan efektivitas dan efisiensi lebih cenderung bersifat administrasi.

1. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi pasar dan potensial hasil retribusi pasar (Nick Devas, 1989 : 144). Hasil pungutan retribusi yang biasa disebut realisasi adalah banyaknya uang yang dapat ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah (melalui petugas pasar) atas jasa yang berkaitan pemerintah daerah berupa fasilitas tempat dasaran untuk berjualan bagi para pedagang baik

perseorangan atau badan hukum. Sedangkan potensi retribusi pasar yang akan dapat ditarik berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Misalnya : luas tempat dasaran, perkiraan banyaknya pedagang yang masuk, peluang perluasan pasar serta tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan keterbatasan kemampuan petugas pasar dalam tata usaha.

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan retribusi pasar, menetapkan obyek dan tarif retribusi pasar, memungut retribusi pasar, menegakkan sistem retribusi dan membukukan penerimaan. Ada beberapa faktor yang mengancam efektivitas retribusi pasar yaitu menghindari retribusi pasar oleh wajib retribusi pasar, kerjasama antara petugas retribusi pasar dan wajib retribusi pasar untuk mengurangi jumlah retribusi terhutang dan penipuan oleh petugas retribusi dengan mengantongi sebagian penerimaan retribusi pasar. Oleh sebab itu pengawasan, koordinasi dan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang sangat penting untuk menghindari kecurangan-kecurangan.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya memungut retribusi pasar (Nick Devas, 1989 : 146). Semakin kecil hasil pemungutan maka semakin besar biaya memungut, hal ini akan terjadi jika banyak wajib retribusi pasar yang menghindari pembayaran atau mungkin disebabkan kecurangan yang dilakukan oleh petugas sendiri.

3. Elastisitas

Elastisitas menggambarkan derajat kepekaan atau tingkat pengaruh dari suatu variabel kepada variabel lain. Dalam hal ini elastisitas dapat diukur dengan membandingkan perubahan penerimaan retribusi pasar dalam suatu periode dengan perubahan Produk Domestic Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk.

Gambaran mengenai elastisitas retribusi pasar mencerminkan pertumbuhan yang optimis dalam potensi retribusi pasar terlepas dari keputusan untuk mengubah tarif retribusi pasar (DeveyK.J, 1998:42).

BAB III

GAMBARKAN UMUM DAERAH PENELITIAN

3.1. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara $110^{\circ}30'$ - $110^{\circ}45'$ BT dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'$ LS. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Klaten adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran :

- Sebelah Utara : Dataran lereng Gunung Kidul
- Sebelah Timur : Membujur dataran rendah
- Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur.

Jarak Ibukota Kabupaten Klaten dengan beberapa kota lainnya :

Surakarta : 36 Km

Sukoharjo : 47 Km

Wonogiri : 67 Km

Karanganyar : 49 Km

Sragen : 63 Km

Boyolali : 38 Km

Salatiga	: 65 Km
Semarang	: 113 Km
Demak	: 139 Km
Kudus	: 164 Km
Pati	: 188 Km
Jepara	: 199 Km
Kendal	: 142 Km
Batang	: 206 Km
Pekalongan	: 206 Km
Tegal	: 278 Km
Magelang	: 73 Km
Temanggung	: 96 Km
Wonosobo	: 135 Km
Banjarnegara	: 157 Km
Purwokerto	: 188 Km
Cilacap	: 228 Km

Kabupaten Klaten Merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah, yang secara administrative kabupaten seluas 655.56Km tersebut terbagi dalam 26 Kabupaten seperti terlihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Luas Wilayah, Desa, Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2002

No.	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Prambanan	16	24,43
2	Gantiwarno	16	25,64
3	Wedi	19	24,38
4	Bayat	18	39,43
5	Cawas	20	34,47
6	Trucuk	18	33,81
7	Kalikotes	7	12,98
8	Kebonarum	7	9,67
9	Jogonalan	18	26,07
10	Manisrenggo	16	26,96
11	Karangnongko	14	26,74
12	Ngawen	13	16,97
13	Ceper	18	24,45
14	Pedan	14	19,17
15	Karangdowo	19	29,23
16	Juwiring	19	29,79
17	Wonosari	18	31,14
18	Delanggu	16	18,78
19	Polanharjo	18	23,84
20	Karanganom	19	24,06
21	Tulung	18	32,00
22	Jatinom	17	35,53
23	Kemalang	13	51,66
24	Klaten Selatan	11	14,43
25	Klaten Tengah	3	8,92
26	Klaten Utara	6	10,38
Jumlah		391	655,56

Sumber : BPS Kabupaten Klaten

3.2. Keadaan Penduduk

Pada akhir tahun 2001 jumlah penduduk di Kabupaten Klaten sebanyak 1.2650.295 yang terbesar di 26 kecamatan. Adapun laju pertumbuhan, penambahan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Kabupaten Klaten Tahun 2002

No.	Kecamatan	2001	2002	Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (Presentase)
1	Prambanan	44.036	44.542	506	1,15
2	Gantiwarno	39.907	40.039	132	0,33
3	Wedi	53.680	54.346	666	1,24
4	Bayat	63.275	63.483	208	0,33
5	Cawas	64.488	64.619	131	0,20
6	Trucuk	77.807	78.269	462	0,59
7	Kalikotes	35.810	36.115	305	0,85
8	Kebonarum	21.047	21.160	113	0,54
9	Jogonalan	56.664	56.909	245	0,43
10	Manisrenggo	40.448	40.731	283	0,70
11	Karangnongko	37.623	37.719	96	0,26
12	Ngawen	43.221	43.468	247	0,57
13	Ceper	62.635	62.915	280	0,45
14	Pedan	47.609	47.754	145	0,30
15	Karangdowo	51.416	51.519	103	0,20
16	Juwiring	61.184	61.336	152	0,25
17	Wonosari	61.033	61.271	238	0,39
18	Delanggu	44.272	44.213	-59	-0,13
19	Polanharjo	45.047	45.094	47	0,10
20	Karanganom	48.983	49.065	82	0,17
21	Tulung	54.092	54.267	175	0,32
22	Jatinom	55.702	55.958	256	0,47
23	Kemalang	34.146	34.380	234	0,68
24	Klaten Selatan	39.365	39.645	280	0,71
25	Klaten Tengah	42.699	42.990	291	0,68
26	Klaten Utara	39.106	39.723	617	0,58
Jumlah		1.265.295	1.271.530	6.235	0,49

Sumber : BPS Kabupaten Klaten

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2002 kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Trucuk dengan jumlah penduduk 78.269 jiwa dari penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kebonarum dengan jumlah penduduk 21.160 jiwa .

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan (persentase) maka Kecamatan Polanharjo memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terkecil yaitu 0.10%, dan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling tinggi adalah Kecamatan Wedi dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.24%. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 0.49.

3.2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Kecamatan dan Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kelompok Kecamatan dan jenis kelamin laki-laki pada akhir tahun 2002 berjumlah 619.155 jiwa dan jumlah penduduk wanita 652.375. Perincian jumlah penduduk menurut kelompok kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat dari Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Klaten Tahun 2002

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Prambanan	21.346	23.196	44.542	92,02
2	Gantiwarno	18.696	21.343	40.039	87,60
3	Wedi	26.193	28.153	54.346	93,04
4	Bayat	30.938	32.545	63.483	95,06
5	Cawas	31.752	32.867	64.619	96,61
6	Trucuk	38.783	39.486	78.269	98,22
7	Kalikotes	17.701	18.414	36.115	96,13
8	Kebonarum	10.125	11.035	21.160	91,75
9	Jogonalan	28.090	28.819	56.909	97,47
10	Manisrenggo	19.468	21.263	40.731	91,56
11	Karangnongko	18.274	19.472	37.719	93,71
12	Ngawen	21.345	22.123	43.468	96,48
13	Ceper	30.852	32.063	62.915	96,22
14	Pedan	23.469	24.285	47.754	96,64
15	Karangdowo	25.152	26.367	51.519	95,39
16	Juwiring	29.801	31.535	61.336	94,50
17	Wonosari	29.411	31.860	61.271	92,31
18	Delanggu	21.788	22.425	44.213	97,16
19	Polanharjo	21.971	23.123	45.094	95,02
20	Karanganom	23.941	25.124	49.065	95,29
21	Tulung	26.601	27.666	54.267	96,15
22	Jatinom	27.147	28.811	55.958	94,22
23	Kemalang	16.760	17.620	34.380	95,12
24	Klaten Selatan	19.137	20.328	39.645	95,03
25	Klaten Tengah	20.909	22.081	42.990	94,69
26	Klaten Utara	19.352	20.371	39.723	95,00
	Jumlah	619.155	652.375	1.271.530	94,91

Sumber : BPS Kabupaten Klaten

3.3. Keadaan Perekonomian

Pembangunan daerah terbagi bidang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pendapatan yang lebih merata melalui kesempatan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu pembangunan harus memfokuskan pada pemerataan produksi dan stabilitas daerah.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Harga Konstan
Tahun 1991-2001

Tahun	PDRB (Rp)	Pertumbuhan PDRB (%)
1992/1993	-	-
1993/1994	1.033.236,12	-
1994/1995	1.096.276,16	66,10
1995/1996	1.777.447,97	7,46
1996/1997	1.261.298,48	7,12
1997/1998	1.295.075,63	2,68
1998/1999	1.148.045,58	-11,35
1999/2000	1.153.627,74	0,49
2000	1.999.551,88	3,98
2001	1.247.746,75	4,02
2002	1.290.967,26	3,46
Rata-rata		

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB pada umumnya terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 1998/1999 mengalami penurunan sebesar -11,35% dibanding tahun sebelumnya. Keadaan ini mencerminkan kondisi perekonomian yang mantap dan stabil. Perkembangan PDRB menurut harga konstan tertinggi terjadi pada tahun 1994/1995 sebesar 66,10%. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 1998/1999 sebesar -11,35%.

3.3.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi pembiayaan penggalan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai gambaran mengenai penerimaan PAD di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten
Tahun 1991/1992-2000/2001

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1991/1992	4.168.554.760	-
1992/1993	3.676.305.968	-11,80
1993/1994	4.137.097.965	12,53
1994/1995	5.055.830.409	22,20
1995/1996	6.849.737.199	35,48
1996/1997	8.159.168.374	19,11
1997/1998	8.943.579.945	9,61
1998/1999	11.608.314.938	29,8
1999/2000	11.620.886.988	0,11
2000	11.446.454.153	-1,50
2001	21.717.222.756	89,72
Rata-rata		20,53

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka Tahun 2002

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten tahun 1991/1992 menunjukkan tingkat rata-rata sebesar 20,53%. Pada tahun 1991/1992 perkembangan Pendapatan Asli Daerah sangat rendah dibanding dengan perkembangan tahun sebelumnya yaitu sebesar -11,80%. Sedangkan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 sebesar 89,72%.

3.3.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD di Kabupaten Klaten yang memiliki peran cukup besar dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Retribusi daerah di Kabupaten Klaten terdiri 37 pos pada tahun 2001. Jumlah tersebut merupakan pos retribusi yang diberlakukan oleh Pemerintah Klaten. Target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2001

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	Pelayanan kesehatan	1.311.500.000	1.405.176.994
2	Pelayanan kebersihan	41.000.000	44.207.425
3	Biaya cetak KTP & Akte Capil	710.000.000	706.932.750
4	Ret. Parker	397.000.000	252.331.000
5	Ret. Pasar	1.207.500.000	1.295.296.866
6	Ret. Alat Pemadam Kebakaran	3.501.000	3.507.000
7	Ret. pemakain kekayaan Daerah.	126.931.000	140.563.585
8	Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	290.096.000	311.257.513
9	Ret. Terminal	190.000.000	200.745.200
10	Ret. RPH	89.010.000	89.126.250
11	Ret. Tempat rekreasi dan Olah raga	409.240.000	456.359.801
12	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	110.000.000	162.920.706
13	Ret. Ijin Gangguan	50.150.000	54.387.500
14	Ret. Leges		
15	Ret. Dispensasi Jalan		
16	Ret. Penambangan		
17	Ret. Pengujian KTP		
18	Ret. Pemeriksaan Air Susu		
19	Ret. Lulusan Rojokoyo		
20	Ret. Huler		
21	Ret. Kesehatan Calon Mempelai		
22	Ret. Ijin Penitipan Sepeda		
23	Ret. Angk Kendaran Bermotor		
24	Ret. Pemeriksaan Hewan Penghela		
25	Ret. Pengusahaan kandang Babi		

26	Ret. Penyedotan Kakus	9.000.000	10.000.000.
27	Ret. Penjualan produksi usaha Daerah	21.650.000	21.653.000
28	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	247.461.000	301.165.500
29	Ret. Ijin Trayek	7.996.000	8.027.300
30	Ret Pelayanan Pemakaman Umum		
31	Ret. SIUP		
32	Ret. Pemanfaatan Lahan		
33	Ret. IUJK		
34	Ret. Pengadaan Barang dan jasa		
35	Ret. Ijin Dibid Kesehatan		
36	Ret. Ijin Penyelenggaraan Bidang Kepariwisataaan		
37	Ret. Tempat Khusus Parkir		

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2001

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Pasar merupakan penerimaan tertinggi kedua setelah penerimaan pelayanan kesehatan sebesar Rp 1.405.176.994 Sedangkan Ret Pemadam Kebakaran merupakan penerimaan retribusi daerah terendah.

3.4. Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten

Untuk membiayai pembangunan di daerah maka diperlukan dana. Salah satu sumbernya berasal dari retribusi pasar. Retribusi pasar di Kabupaten Klaten mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai langkah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Klaten berkaitan dengan masalah Retribusi Pasar.

Sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat, penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan retribusi pasar tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten
Tahun Anggaran 1991/1992-2001

Tahun	Realisasi	Target
1992/1993	416.729.600	395.000.000
1993/1994	517.818.395	465.000.000
1994/1995	800.634.305	840.000.000
1995/1996	784.096.106	806.000.000
1996/1997	906.139.211	890.000.000
1997/1998	1.037.720.352	960.735.000
1998/1999	1.024.525.555	947.735.000
1999/2000	1.060.060.605	1.003.575.000
2000	855.676.837	775.500.000
2001	1.295.296.866	1.207.500.000
2002	1.324.090.000	1.300.000.000
Rata-rata		

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pasar di kabupaten Klaten dilihat dari target maupun realisasi dari tahun ke tahun pada umumnya terus mengalami peningkatan, kecuali untuk target tahun 1995/1996 dengan tahun 2001 tidak sesuai antara target dengan realisasi dengan kata lain mengalami penurunan.

3.4.1. Nama Pasar di Kabupaten Klaten

Di Kabupaten Klaten terdapat 88 pasar, Penerimaan retribusi pasar terbesar adalah dari Pasar daerah Mlinjon yaitu sebesar Rp 385.000.000, sedangkan penerimaan retribusi pasar terendah adalah Pasar Plaza Klaten Sebesar Rp 12.000.000. Untuk lebih jelas lihat Tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Nama-nama Pasar dan Besarnya Pemasukan Uang
Di Kabupaten Klaten
Tahun 2001

NO	UNIT / PASAR	KETERANGAN (OMZET)
I.1	PLASA KLATEN	12.000.000
II.2	KLATEN III LANTAI	540.600.000
III.	MLINJON	
3	MLINJON	5.750.000
4	NGEPOS	4.125.000
5	PASAR BUAH/JL. BALI	5.350.000
6	GUNUNGAN	9.000.000
7	PEJEMIHON HEWAN	6.500.000
8	PLEMBON UMUM	9.800.000
9	SIRAGO	17.550.000
10	BARENG	1.000.000
11	GAYAMPRIK	5.800.000
12	BENDOGANTUNGAN	2.050.000
		620.025.000
IV.	KLATEN II	
13	TOTOGAN	7.600.000
14	GENTONGAN	20.320.000
15	SENGGOL	6.060.000
16	MAYUNGAN	3.000.000
		36.960.000
V.	JATINOM	
17	JATINOM	64.600.000
18	GABUS	12.576.000
19	JOLOTUNDO	893.000
20	NGEMPLAK	424.000
21	POMAH	1.443.000
22	MUNDU	16.683.500
23	KLODRAN	1.608.500
24	BONYOKAN	1.823.000
		100.051.000
VI.	TULUNG	
25	JEBLOG	10.950.000
26	NGENDO	3.660.000
27	KARANGAN	6.040.000
28	KARANGANOM	8.840.000
29	COKRO KEMBANG	13.960.000
30	TULUNG	1.600.000
31	BONO	1.650.000
		46.700.000
VII.	DELANGGU	
32	DELANGGU	242.550.000
33	TEGALGONDO	40.650.000
34	GLAGAHWANGI	-
35	NGARAN	-
36	KLEPU	-
		283.200.000
VIII.	TANJUNG	
37	TANJUNG	21.100.000
38	JUWIRING	16.600.000
39	PANJANGAN	6.620.000
40	BABADAN	4.800.000
41	CARIKAN	2.480.000
		51.600.000
IX.	MINGGIRAN	
42	MINGGIRAN	15.308.000
43	SOKA	3.663.600
44	KARANGTALUN	3.986.100
45	POSIS	3.762.500
		26.720.200

X. 46	PEDAN	290.200.000
XI.	MASARAN	
47	MASARAN	210.000.000
48	BANDUNGREJO	9.850.000
49	BARAN	2.625.000
50	BALAK	8.850.000
51	KALIMANGU	1.050.000
		232.375.000
XII.	SIDOHARJO	
52	SIDOHARJO	21.300.000
53	KARANGASEM	2.350.000
54	KARAKTIAN/BAYAT	125.000
55	JERUKAN	700.000
56	JONGGRANGAN	-
		24.475.000
XIII.	WEDI	
57	WEDI	134.700.000
58	JIMBUNG	10.875.000
59	SAWONGABETAN	1.320.000
		146.895.000
XIV.	KRAGUMAN	
60	KRAGUMAN	40.400.000
61	PULUHWATU	57.750.000
62	POKOH	395.000
63	DOMPYONGAN	7.500.000
64	SROWOT	5.475.000
		111.520.000
XV.	PRAMBANAN	
65	PRAMBANAN	15.450.000
66	TAJI	12.000.000
67	MANISRENGGO	32.700.000
68	WANUTUNGGAL	825.000
69	INPRES BURUNG	200.000
70	MANDUNGAN	300.000
		61.475.000
XVI.	GANTIWARNO	
71	GANTIWARNO	2.080.000
72	PANGGIL	3.490.000
73	GEMPOL	7.800.000
74	BAI ONG	440.000
75	KEPOH	2.760.000
76	MENGGAH	3.160.000
77	KEBONAGUNG	800.000
		20.530.000
XVII	KEMBANG	
78	KEMBANG	28.800.000
79	SUROWONO	18.200.000
80	BUTUH	1.280.000
		48.280.000
XVIII	BABAD	
81	BABAD	24.000.000
82	GAMONGAN	14.125.000
83	TEMUWANGI	18.600.000
84	NGEBEG	7.500.000
85	JETO	11.000.000
86	JETIS	4.000.000
87	KIRINGAN	7.750.000
88	PAGER	1.200.000
	JUMLAH UNIT BABAD	88.175.000
	JUMLAH SELURUH UNIT	2.741.861.200

Perbedaan penerimaan retribusi pasar diberbagai pasar di Kabupaten Klaten terhitung wajar, karena perbedaan letak pasar dan luas pasar akan mempengaruhi hasil penerimaan retribusi pasar.

3.4.2. Tarif Retribusi Pasar

Dalam Peraturan Daerah Nomor 51.2/171/1990 Kabupaten Klaten tentang retribusi pasar ditetapkan besarnya pungutan uang pasar berdasar kelas pasar. Kelas pasar yang dimaksud adalah kriteria berdasarkan lokasi pasar.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas tempat dasaran, los dan toko atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

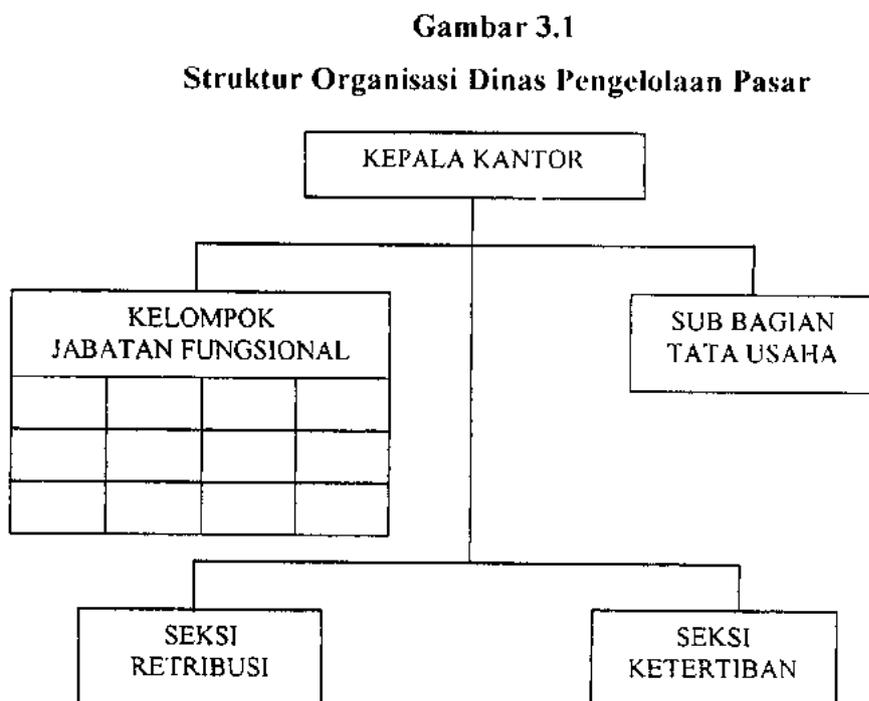
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya penyelenggaraan meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

3.5. Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten

Dinas pengelolaan pasar adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah. Dinas pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

3.5.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Pasar mengacu pada Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



PENJABARAN TUGAS

KEPALA KANTOR

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengelolaan pasar.
- (2) Penjabaran Tugas Kepala Kantor dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, pedoman kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengelolaan pasar.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah dibidang pengelolaan pasar.
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan pasar.
- d. Menetapkan dan mengatur penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- e. Memberi izin dan mengawasi dibidang pengelolaan pasar.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
- g. Menetapkan pengaturan pasar
- h. Menginvestasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pasar dan menyiapkan petunjuk teknis pemecahan masalah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas urusan umum, keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.
- (2) Penjabaran tugas dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tata usaha.
- b. Menyusun rencana program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang umum, perlengkapan, keuangan serta kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- e. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan kantor dan inventarisasi.
- f. Memberikan pelayanan administrasi.
- g. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pasar.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan masalah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

SEKSI RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang pendapatan pasar.

(2) Penjabaran tugas dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari, merencanakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pendapatan pasar.
- b. Menyusun rencana program, pedoman dan kegiatan serta petunjuk teknis dibidang retribusi dan perijinan pasar.
- c. Melaksanakan pungutan dan penagihan pendapatan pasar.
- d. Merencanakan dan melaksanakan target pendapatan pasar.
- e. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan dan pembinaan penempatan pedagang pasar dan sekelilingnya.
- f. Melaksanakan pemberian izin fasilitas pasar.
- g. Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas operasional sesuai dengan perencanaan pada Kantor Pengelolaan Pasar.
- h. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pelaporan dibidang pendapatan pasar secara periodik dan berkesinambungan.
- i. Melaksanakan kebijakan kepada pedagang dan mengadakan penagihan tunggak dan kios pasar.
- j. Melaksanakan pembinaan administrasi pendapatan pasar.
- k. Menginvestasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan masalah.

- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI KETERTIBAN

Pasal 5

- (1) Seksi Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang meliputi kebersihan, pemeliharaan bangunan, penyediaan air bersih, penerangan lingkungan pasar, keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Penjabaran tugas dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun, mempelajari, merencanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pedoman petunjuk teknis dibidang ketertiban pasar.
 - b. Menyusun rencana program, pedoman kegiatan serta petunjuk teknis dibidang kebersihan dan pemeliharaan bangunan, penyediaan air bersih, ketertiban dan keamanan pasar serta lingkungannya.
 - c. Melaksanakan program pembangunan, pemeliharaan, penyediaan air bersih, ketertiban dan keamanan pasar.
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program kebersihan agar tercipta pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

- e. Mengadakan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan bangunan dan perlengkapan lainnya.
- f. Melaksanakan penyusunan jadwal pengaturan kebersihan dan penampungan sampah dilingkungan pasar.
- g. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pengawasan dan pelaporan dibidang pembangunan, pemeliharaan, ketertiban dan keamanan pasar.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang dengan tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas fungsi ilmu pengetahuan jabatan fungsional yang bersangkutan dan terikat etika profesi.
- (2) Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dan suatu bidang dan terikat etika profesinya.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Cara Penelitian

4.1.1. Data dan Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini dilaksanakan dengan obyek penelitian di Kabupaten Klaten. Pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari literatur-literatur maupun buku-buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
2. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan mendatangi langsung terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan :
 - Data primer yang diambil berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden staf Dinas Pengelolaan pasar, staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah.

Data sekunder, terdiri dari data pendapatan asli daerah, data penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 1992/1993-2002, selain data-data tersebut data sekunder yang digunakan adalah data-data

pendukung untuk mencari potensi pendapatan retribusi pasar setelah diklasifikasi dengan menggunakan alat analisis. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan daerah dan Dinas Pengelolaan Pasar.

4.1.2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan analisis dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban serta gambaran dari permasalahan prosedur pungutan retribusi pasar di Kabupaten Klaten, agar usaha peningkatan dan pengelolaan retribusi pasar dapat dikelola secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang.

4.2. Peranan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan barang sandang dan pangan, dimana makin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, permintaan dan kebutuhannya juga meningkat. Keadaan ini dilihat dari aktivitas pedagang sebagai pemasok barang-barang di pasar dan pengunjung sebagai konsumen barang yang ditawarkan.

Untuk melihat seberapa besar peranana retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus konstribusi yang merupakan

perbandingan penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100%. Besarnya kontribusi pasar untuk tahun anggaran 1992/1993-2002 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten. Adapun peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dapat dihitung dengan membandingkan angka realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap angka Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini disajikan Tabel 4.1 yang dapat memberikan gambaran peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.1
Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Klaten
Tahun 1992/1993-2002

Tahun	Realisasi Penerimaan Restribusi Pasar (Rp)	PAD (Rp)	Penerimaan
1	2	3	(2)/(3) = 4
1992/1993	416.729.600	4.161.487.829	10,01%
1993/1994	517.818.395	4.724.783.687	10,96%
1994/1995	800.634.305	5.665.515.313	14,13%
1995/1996	784.096.106	6.060.622.068	12,94%
1996/1997	906.139.211	6.209.151.965	14,59%
1997/1998	1.037.720.352	6.941.367.697	14,95%
1998/1999	1.024.525.555	7.469.951.411	13,72%
1999/2000	1.060.060.605	7.901.972.074	13,42%
2000	855.676.837	6.598.253.386	12,97%
2001	1.295.296.866	13.831.407.402	9,36%
2002	1.324.090.000	17.534.903.154	7,55%
Rata-rata			12,24%

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten dari tahun 1992/1993-2002 pada umumnya mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 1995/1995 sampai dengan tahun 2002 mengalami penurunan. Begitu pula dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan perkembangan yang tidak stabil. Pada umumnya mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pada tahun 2000 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peranan tertinggi sebesar 14,95% terjadi pada tahun 1997/1998, sedangkan peranan yang terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 7,55%. Jadi peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten dari tahun 1992/1993 sampai dengan 2002 cukup besar dengan rata-rata 11,18%.

4.3. Analisis Efektivitas

Efektivitas retribusi pasar merupakan suatu alat untuk mengukur rasio antara realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap target penerimaan retribusi pasar. Adapun perhitungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas retribusi pasar Kabupaten Klaten adalah perbandingan angka hasil penerimaan retribusi pasar dengan angka target penerimaan retribusi pasar. Dengan anggapan semua wajib retribusi pasar membayar retribusi pasar, maka besarnya tingkat efektivitas retribusi pasar tahun 1992/1993 – 2002 dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar
Di Kabupaten Klaten
Tahun 1992/1993-2002

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Efektivitas (%)
1	2	3	(2)/(3) = 4
1992/1993	416.729.600	395.000.000	105,50%
1993/1994	517.818.395	465.000.000	111,36%
1994/1995	800.634.305	840.000.000	95,31%
1995/1996	784.096.106	806.000.000	97,28%
1996/1997	906.139.211	890.000.000	101,81%
1997/1998	1.037.720.352	960.735.000	108,01%
1998/1999	1.024.525.555	947.735.000	108,08%
1999/2000	1.060.060.605	1.003.575.000	105,63%
2000	855.676.837	775.500.000	110,34%
2001	1.295.296.866	1.207.500.000	107,27%
2002	1.324.090.000	1.300.000.000	101,85%
Rata-rata			104,77%

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Keterangan diperoleh dari BAPEDA :

- a. Angka Efektifitas 100 % keatas artinya sangat efektif
- b. Angka Efektifitas 75% - 100 % artinya efektif
- c. Angka Efektifitas 50% - 75 % artinya kurang efektif
- d. Angka Efektifitas 50% kebawah artinya tidak efektif.

Realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Klaten menunjukkan angka yang tidak stabil dari tahun ke tahun, sedangkan target penerimaan retribusi pasar dari tahun 1992/1993 sampai dengan 2002, selalu mengalami peningkatan secara terus menerus, kecuali pada tahun 2000 targetnya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tingkat efektifitas pemungutan retribusi terendah terjadi pada tahun 1995/1996 yaitu sebesar 95,28% dengan nilai rata-rata sebesar 104,77%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas pemungutan retribusi pasar diatas 100% sangat efektif, jadi hipotesis yang menyatakan pemungutan retribusi pasar ini sudah efektif diterima.

4.4. Analisa Efisiensi

Efisiensi digunakan untuk mengetahui rasio dari hasil realisasi penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu untuk melihat tingkat efisiensi dari pemungutan retribusi pasar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar
di Kabupaten Klaten
Tahun 1992/1993-2002

Tahun	Realisasi Biaya Operasional Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Penerimaan Restribusi Pasar (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	(2)/(3) = 4
1992/1993	10.355.300	416.729.600	2,48%
1993/1994	19.713.600	517.818.395	3,80%
1994/1995	21.829.903	800.634.305	2,73%
1995/1996	34.382.400	784.096.106	4,38%
1996/1997	29.580.000	906.139.211	3,26%
1997/1998	22.197.595	1.037.720.352	2,14%
1998/1999	15.173.560	1.024.525.555	1,49%
1999/2000		1.060.060.605	
2000	25.969.000	855.676.837	3,03%
2001	32.411.952	1.295.296.866	2,50%
2002	89.127.216	1.324.090.000	6,73%
Rata-rata			3,02%

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Dari hasil analisis efisiensi di atas dapat dilihat pemungutan retribusi pasar pada tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 2002 dengan rata-rata 3,02%. Dapat dilihat pula tingkat efisiensi dari tahun ke tahun yang mengalami perbedaan. tingkat efisiensi paling tinggi terjadi pada tahun 1998/1999 sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2002 perbedaan terjadi karena adanya penambahan – penambahan biaya. Pemungutan dapat dikatakan efisiensi adalah biaya pemungutan yang minimal dan dapat menghasilkan

penerimaan retribusi pasar yang maksimal. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi pasar sudah efisien diterima.

4.5. Analisis Elastisitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan penerimaan retribusi pasar yang diperoleh sebagai akibat dari adanya perubahan yang terjadi pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi pasar. Faktor-faktor tersebut adalah PDRB dan jumlah penduduk.

4.5.1. Elastisitas PDRB terhadap Penerimaan Retribusi Pasar

Untuk mengetahui besarnya elastisitas ini dapat diperoleh dengan membagi besarnya prosentase perubahan retribusi pasar dengan prosentase perubahan PDRB. Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan PDRB (%) dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{(n - n_1)}{n_1} \times 100\%$$

n = tahun sekarang

n₁ = tahun sebelumnya

Adapun Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Elastisitas PDRB terhadap Penerimaan Retribusi Pasar
Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten
Tahun 1992/1993-2002

Tahun	Penerimaan Restribusi Pasar (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar (%)	PDRB (Rp)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas
1	2	3	4	5	(3)/(5) = 6
1992/1993	416.729.600	-	-	-	-
1993/1994	517.818.395	24,26	1.033.236,12	-	-
1994/1995	800.634.305	54,61	1.096.276,16	66,10	0,82
1995/1996	784.096.106	-2,06	1.177.447,97	7,40	0,27
1996/1997	906.139.211	15,53	1.261.298,48	7,12	2,18
1997/1998	1.037.720.352	14,52	1.295.075,63	2,68	5,41
1998/1999	1.024.525.555	-1,27	1.148.045,58	-11,35	-0,11
1999/2000	1.060.060.605	3,46	1.153.627,74	0,49	7,06
2000	855.676.837	-19,28	1.199.551,88	3,98	4,84
2001	1.295.296.866	51,37	1.247.746,75	4,02	12,77
2002	1.324.090.000	2,22	1.290.967,26	3,46	0,64
Rata-rata					3,76

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Dari data di atas, elastisitas PDRB terhadap retribusi pasar di Daerah Tingkat II Klaten tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan ketidakstabilan dari tahun ke tahun dengan elastisitas rata-rata 0,76% menunjukkan elastisitas lebih besar dari 1% sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB elastis terhadap perubahan retribusi pasar.

4.5.2 Elastisitas Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Retribusi Pasar

Untuk mengetahui besarnya elastisitas ini dapat diperoleh dengan membagi besarnya prosentase perubahan penerimaan retribusi pasar dengan prosentase perubahan jumlah penduduk. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Elastisitas Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Retribusi Pasar
Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten
Tahun 1992/1993-2002

Tahun	Penerimaan Restribusi Pasar (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar (%)	Jumlah Penduduk (Rp)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas
1	2	3	4	5	(3)/(5) = 6
1992/1993	416.729.600	-	1.189.964	0,45	-
1993/1994	517.818.395	24,26	1.196.501	0,55	44,11
1994/1995	800.634.305	54,61	1.202.742	0,52	105,01
1995/1996	784.096.106	-2,06	1.216.009	1,10	1,87
1996/1997	906.139.211	15,53	1.223.439	0,61	25,45
1997/1998	1.037.720.352	14,52	1.228.640	0,43	33,76
1998/1999	1.024.525.555	-1,27	1.234.113	0,44	2,88
1999/2000	1.060.060.605	3,46	1.242.711	0,70	4,94
2000	855.676.837	-19,28	1.252.711	1,20	16,06
2001	1.295.296.866	51,37	1.265.295	0,60	85,6
2002	1.324.090.000	2,22	1.271.530	0,49	4,53
Rata-rata					32,45

Sumber : Kabupaten Klaten dalam Angka 2002, diolah

Dilihat dari data di atas dapat diperoleh gambaran bahwa elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk rata-rata memiliki nilai 32,45%. Elastisitas terbesar terjadi pada tahun 1994/1995 sebesar 105,01, sedangkan terkecil pada tahun 1995/1996 sebesar 1,87. Sehingga retribusi pasar dikatakan elastis terhadap perubahan jumlah penduduk, dan hipotesa yang menyatakan bahwa retribusi pasar elastis terhadap jumlah penduduk diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maupun uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Peranan retribusi pasar terhadap PAD tahun 1992/1993 sampai tahun 2002 relatif besar yaitu antara 7,55% sampai 14,59% dengan rata-rata kontribusi PAD sebesar 12,24%. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan retribusi pasar mempunyai peranan yang besar terhadap PAD dapat diterima.
2. Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Klaten berjalan efektif berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap rasio efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Klaten pada tahun 1992/1993 sampai dengan 2002 berkisar antara 95,31% sampai dengan 111,36% dengan rata-rata efektifitas sebesar 104,77% pertahun, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pasar sudah dijalankan secara efektif, jadi hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi pasar merupakan retribusi yang efektif, terbukti.
3. Retribusi pasar di Kabupaten Klaten merupakan retribusi yang efisien berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan di muka bahwa tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Klaten pada tahun 1992/1993-2002 dengan rata-rata tingkat efisiensi 3,02% pertahun, yang artinya 3,02% dari realisasi penerimaan retribusi pasar digunakan untuk

biaya, jadi hipotesis yang menyatakan penerimaan retribusi pasar efisien dapat diterima.

4. Elastisitas PDRB terhadap penerimaan retribusi pasar dikabupaten klaten pada tahun 1992/1993-2002 bersifat inelastis, dengan angka elastisitas antara -0,11% sampai dengan 12,77% dengan rata-rata tingkat elastisitas sebesar 3,76% berdasarkan nilai elastisitas tersebut maka hipotesis yang menyatakan penerimaan retribusi pasar elastis terhadap PDRB.
5. Elastisitas jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi pasar dikabupaten klaten pada tahun 1992/993 sampai dengan 2002 bersifat elastis dengan angka elastisitas antara 1,87% sampai dengan 105,01%. rata-rata tingkat elastisitasnya sebesar 32,45%. berdasarkan nilai elastisitasnya tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk elastis terhadap penerimaan retribusi pasar, sehingga penerimaan retribusi pasar terhadap jumlah penduduk dapat diterima.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas ada beberapa saran sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Klaten. Adapun Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Klaten belum efektif sebagaimana yang diharapkan, untuk itu perlu kiranya dinas pengelolaan pasar di Kabupaten Klaten lebih meningkatkan pos penerimaan dalam upaya mengoptimalkan usaha melalui pengelolaan pasar yang lebih baik dan profesionalisme tinggi.
2. Potensi retribusi pasar di Kabupaten Klaten cukup besar. Sehingga perlu dilakukan usaha yang aktif dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar guna mengimbangi potensi yang ada, dengan cara melakukan penyuluhan untuk menyadarkan para wajib retribusi pasar untuk selalu membayar retribusi pasar, mempertahankan fasilitas yang ada dan meningkatkan fasilitas yang dirasakan kurang.
3. Melakukan pendataan besarnya jumlah retribusi pasar dengan lebih cermat dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan lapangan agar lebih menjangkau para wajib retribusi pasar yang belum dikenai pungutan.
4. Bagi para wajib retribusi pasar di Kabupaten Klaten diharapkan mampu berperan aktif dalam melakukan kewajibannya dan dapat memelihara dengan baik fasilitas yang diberikan.
5. Guna meningkatkan Dinas Pengelolaan Pasar hendaknya masing-masing pasar yang ada di Kabupaten Klaten berusaha meningkatkan produktivitas

melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai baik yang ada di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar maupun yang bertugas di pasar-pasar Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1993, *Ekonomi Mikro*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Dominick Salvatore, 1996, *Teori Mikro Ekonomi*, Erlangga Edisi Ketiga, Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 1998, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Munawir, 1990, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nick Devas, *et.al.*, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 1993, *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Bab IV, Bidang Ekonomi Sub 12C, Jakarta.
- Suparmoko, M., 1990, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Soetrisno, PH., 1981, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Teguh Pudjo Mulyono, 1993, *Manajemen Kredit*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1993.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2000*, 2000, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta.

LAMPIRAN

➤ **Tarif Retribusi Pasar (I)**

Penetapan tarif retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi :

- a. Pasar dibiayai dengan kegiatannya dibedakan :
 1. Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para pedagang dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dengan tingkat pelayanannya terbatas.
 2. Pasar modern adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk eceran atau grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih luas.

- b. Pasar dari jenis dagangannya dibedakan
 1. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
 2. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

Besarnya tarif retribusi pasar untuk tiap-tiap daerah dapat bervariasi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku pada tiap-tiap daerah pemungut. Berdasarkan Peraturan Daerah keputusan Bupati Klaten Nomor 974/13/28/2001 tentang Tarif Retribusi Persewaan toko/kios milik atau dalam kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tarif retribusi Persewaan toko/kios milik atau dalam kekuasaan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Untuk barang dagangan yang digelar melebihi batas pintu toko/kios dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten tanggal 25 Oktober 1997 Nomor 974/2028/1997 tentang tarif retribusi Persewaan toko/kios milik atau dalam kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Klaten

Nomor : 974 / 1328 / 2001

Tanggal : 30 Nopember 2001

**TARIF RETRIBUSI PERSEWAAN TOKO/KIOS MILIK ATAU DALAM
KEKUASAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN**

A. Kios Didalam/Diatas Tanah Pasar

NO	TINGKAT KELAS PASAR	TARIF RETRIBUSI PERBULAN/ M2		
		UTAMA (Rp)	SAMPING (Rp)	DALAM (Rp)
1	I A	2.500	1.500	1.000
	I B	2.000	1.000	900
2	II A	2.000	1.000	900
	II B	1.500	700	700
3	III A	1.500	700	700
	III B	1.000	500	500

B. Toko/Kios Diluar Tanah Pasar

NO	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI PERBULAN/ M2	
		KOMPLEK RITA/ ALOON- ALOON	SEPANJANG DAN MENGHADAP JL. PEMUDA
1	Bank/Jasa Sejenis	-	1,2% NJOP PBB
	Toko Barang	2% NJOP PBB	0,8% NJOP PBB
	Dagangan Tradisional	1,5% NJOP PBB	0,6% NJOP PBB

C. Untuk lantai kedua besarnya tarif retribusi 75% dari tarif sebagaimana tersebut huruf A dan B lampiran Surat Keputusan ini.

D. Untuk lantai ketiga besarnya tarif retribusi adalah 50% dari tarif sebagaimana tersebut pada huruf A dan B lampiran Surat Keputusan ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten juga mempunyai ketetapan tentang tingkat kelas pasar dalam wilayah Kabupaten Klaten yang berguna untuk menetapkan besar kecilnya retribusi pasar surat keputusan tersebut pada keputusan Bupati nomor 511.2/ 2027/ 1997.

Tingkat Kelas Pasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tingkat Kelas Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Klaten adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
Tingkat Kelas Pasar sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA
- Kedua : Surat Keputusan ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan keadaan.
Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Keputusan
- Ketiga : Bupati Kepala Klaten Nomor 511.2/171/90 tanggal 11 April 1990 tentang Tingkat Kelas Pasar di Wilayah Kabupaten Klaten dan Keputusan Bupati Kepala Klaten Nomor 511.2/010/92 tanggal 7 Januari 1992 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepala Klaten Tanggal 11 April 1990 Nomor 511.2/171/90 tentang Tingkat Kelas Pasar di Wilayah Kabupaten Klaten dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Klaten

Nomor : 511.2 / 2027 / 1997

Tanggal : 25 Oktober 1997

**TINGKAT KELAS PASAR DALAM WILAYAH
KABUPATEN KLATEN**

NO	KELAS	NAMA PASAR
1.	I	Plasa Klaten
2.	I A	Klaten 3 (tiga) Lantai
3.	I B	Delanggu, Pedan, Wedi
4.	II A	Jatinom, Kraguman, Gabus, Karangan, Mlinjon, Srago, Gentongan.
5.	II B	Taji, Tanjong, Prambanan, Plembon Hewan, Plembon umum, Totogan, Manusrenggo, Sidoharjo, Masaran, Tegalgondo, Kambang.
6.	III A	Puluhwatu, Babad, Posis, Minggiran, Juwiring, Jimbung, Gempol, Jeblog, Cokrokembang
7.	III B	Selain pasar-pasar yang telah disebutkan.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 7 tahun 1984 tentang Pasar dari Pemungutan Retribusinya dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, Bupati ke Palo Klaten.

Tarif Retribusi

- (1) Besarnya tarif retribusi Pasar untuk Pasar umum ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$L \times (1 + NS) \times AR$$

- (2) a. Angka Indeks barang dan nilai strategis adalah sebagai berikut :

		Nilai Strategis							
		Nama	Nilai	Ps. Klas I	Ps. Kls II	Ps. Kls III			
		Indek	Los ter	Lap.	Los ter	Lap.	Los	Lap.	
			buka	Pasar	buka	Pasar	ter.bk	Ps	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
i. Hasil bumi									
1.	Jamu, racikan empon-empon	110	35	30	25	20	15	10	
2.	Sirih, bunga, janganan	90	35	30	25	20	15	10	
3.	Beras, gandum, ketan	100	35	30	25	20	15	10	
4.	Jagung, ketela, kedelai, cantel	60	35	30	25	20	15	10	
5.	Sayur-sayuran, buah-buahan	90	35	30	25	20	15	10	
ii. Grabodan									
1.	Bumbu, daging, bandeng	140	35	30	25	20	15	10	
2.	Garam, gereh, layur	100	35	30	25	20	15	10	
3.	Tembakau, gula, teh	130	35	30	25	20	15	10	

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten ~~Daerah Tingkat II~~ Klaten nomor 7 tahun 1984 tentang Pasar dari Pemungutan Restribusinya dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, Bupati ke Palo Daerah Tingkat II Klaten.

Tarif Restribusi

- (1) Besarnya tarif restribusi Pasar untuk Pasar umum ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$L \times (1 + NS) \times AR$$

- (2) a. Angka Indeks barang dan nilai strategis adalah sebagai berikut :

		Nilai Strategis						
		Nama	Nilai	Ps. Klas I	Ps. Kls II	Ps. Kls III		
		Indek	Los ter	Lap.	Los ter	Lap.	Los	Lap
			buka	Pasar	buka	Pasar	ter.bk	Ps
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Hasil bumi								
1.	Jamu, racikan empon-empon	110	35	30	25	20	15	10
2.	Sirih, bunga, jangon	90	35	30	25	20	15	10
3.	Beras, gandum, ketan	100	35	30	25	20	15	10
4.	Jagung, ketela, kedelai, candel	60	35	30	25	20	15	10
5.	Sayur-sayuran, buah-buahan	90	35	30	25	20	15	10
II. Grabadan								
1.	Bumbu, daging, bandeng	140	35	30	25	20	15	10
2.	Garam, gereh, layur	100	35	30	25	20	15	10
3.	Tembakau, gula, teh	130	35	30	25	20	15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Warung makan/minum							
	1. Rantangan/Awarungan	110	35	36	25	20	15	10
IV.	Tekstil, barang-barang kelontong							
	1. Pakaian rombeng lurik	110	45	40	35	30	25	20
	2. Kintikan, Bolopocab	110	45	40	35	30	25	20
V.	Alat-alat pertanian/Kerajinan	60	35	30	25	20	15	10
	1. Abrag, grabah							
	2. Tikar, kepang, cupil, pande, sangkar, burung	80	35	30	25	20	15	10
VI.	Bahan bangunan							
	1. Gamping, paku, seng	110	50	45	40	35	30	25
	2. Kayu bangunan	130	50	45	40	35	30	25
VII.	Panganan							
	1. Karak, krupuk, rambek, roti	80	35	30	25	20	15	10
	2. Gorengan, nasi, ider, kacang rebus	80	35	30	25	20	15	10
VIII.	Alat teknik/Elektronik							
	1. Radio, Tape recorder Kabel	150	55	50	45	40	15	30
IX.	Unggas hewan kecil/besar	100	35	30	25	20	15	10
	1. Burung, ayam, itik, angsa, mentok							
X.	Promosi							
	1. Obat-obatan, Proganda	110	45	40	35	30	25	20
XI.	Barang Mulia							
	1. Kemasan, jual beli emas	160	75	70	65	60	55	50

b. Tarif Retribusi untuk Pasar Hewan dalah sebagai berikut :

No. :	Jenis Hewan :	Setinggi-tingginya tiap ekor
1 :	2	3
1.	Kerbau, lembu, kuda	500,-
2.	Kambing/domba	200,-

c. Tarif Retribusi Tempat Pemberhentian Pasar dalah sebagai berikut :

No. :	Jenis Kendaraan	Tarif setinggi-tingginya tiap kendaraan
1 :	2	3
1.	Sebuah grobah	
	a. Ukuran besar	
	- Dengan muatan	150,-
	- Tanpa muatan	50,-
	b. Ukuran sedang	
	- Dengan muatan	75,-
	- Tanpa muatan	25,-
2.	Sebuah kereta	25,-
3.	Seekor kuda pengangkut	25,-
4.	Sebuah becak	25,-
5.	Sebuah mobil angkutan penumpang non bus	100,-
6.	Sebuah mobil angkutan barang dagangan beban gandar R	
	a. Lebih s/d 3 ton	300,-
	b. 2 ton s/d 3 ton	250,-
	c. Kurang dari 2 ton	150,-

d. Tarif lain-lain

No. :	Jenis	Tarif setinggi-tingginya
1	2	3
1.	Untuk barang dagangan yang dipikul/dengan sepeda	150,-
2.	Untuk barang dagangan yang dijajakan	25,-
3.	Untuk sebuah sepeda yang diperdagangkan di pasar	100,-
4.	Laporan dalam pasar	500,-
5.	Titipan kendaraan :	
	- Sepeda	25,-
	- Sepeda motor	50,-
	- Sepeda motor mobil	100,-
	Untuk memperoleh kartu pedagang dipungut retribusi sebesar	
	Rp 250,- tidak termasuk pas foto.	

- (3) Untuk pedagang yang berjualan diluar Pasar dikenakan tarif retribusi pasar dua kali lipat besarnya tarif yang dikenakan atau lebih sesuai dengan jumlah tarif retribusi yang harus dibayar.
- (4) Sebagai tanda pembayaran retribusi pasar seperti tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan sehelai karcis atau lebih sesuai dengan jumlah tarif retribusi yang harus dibayar.

➤ **Mekanisme Penarikan (II)**

Mekanisme penarikan retribusi setelah survey ke lapangan ada 2 cara :

1. Harian yaitu dengan cara para pedagang langsung membayar kepada petugas pasar yang setiap harinya datang.

2. Bulanan yaitu dengan cara membayar per bulan kepada petugas pasar yang mendatangi hal ini biasanya dikenakan pada kios bukan los atau dasaran.

Beberapa hasil survey diberbagai pasar di Klaten.

Dari hasil survey banyak poin yang harus diambil :

1. Mekanisme penarikan retribusi yaitu :
 - a. Harian
 - b. Bulanan
2. Besar kecilnya tarif retribusi tergantung :
 - a. Besar kecilnya tempat los atau kios
 - b. Posisi kios atau los
 - c. Banyak sedikitnya dagangan yang diperjual belikan
 - d. Jenis dagangan.
3. Nominal retribusi pasar dari mulai :
 - 300/perhari
 - 400/perhari
 - 600/perhari
 - 1000/perhari
 - 1800/perhari
 - 2000/perhari
 - 12300/perhari
4. Cara perolehan los
 - 1) Disediakan Pemda dengan imbalan membayar karcis tiap harinya.

5. Cara perolehan kios

1) Membeli dengan cara :

a. Kontan

b. Cicilan

6. Khusus untuk pedagan buah ditarik restribusi pasar dua kali pagi dan malam masing-masing Rp 1000,-

Hasil Survey Lapangan

1. Pasar Srago

Nama	Jenis Dagangan	Jenis Tempat	Perolehan Tempat	Tarif Restribusi
Ibu Tutik	Bumbu masak	Los	Pemda	500/perhari
Ibu Hardiyem	Jajanan	Los	Pemda	500/perhari
Ibu Slamet Harjianto	Beras	Los	Pemda	1.000/perhari
Gito Mulyono	Beras	Kios	Cicilan	12.300/perhari
Ibu Temu	Bumbu masak	Los	Pemda	500/perhari
Ibu Timbul	Klontong	Kios	Kontan	12.300/bulan
Ibu Ning	Sayur	Los	Pemda	400/perhari
Ibu Suroso	Bumbu masak	Los	Pemda	600/perhari
Ibu Samini	Beras	Los	Pemda	1.000/perhari

2. Pasar Klaten Bagian Luar

Nama	Jenis Dagangan	Jenis Tempat	Perolehan Tempat	Tarif Restribusi
Nuryani	Bumbu masak	Kios	Kontan	200/perhari
Rini	Bumbu masak	Kios	Kontan	900/perhari
Maryono	Sembako	Kios	Cicilan	1.800/perhari
Siti	Klontong	Kios	Cicilan	1.000/perhari
Iput	Bumbu masak	Kios	Cicilan	400/perhari

3. Pasar Klaten Lantai I

Nama	Jenis Dagangan	Jenis Tempat	Perolehan Tempat	Tarif Restribusi
Ibu Muji	Buah-buahan	Los	Pemda	300/perhari
Ibu Maryono	Bumbu masak	Los	Pemda	300/perhari
Ibu Pariyem	Bumbu masak	Los	Pemda	300/perhari
Ibu Sukinah	Sembako	Los	Pemda	500/perhari

4. Pasar Klaten Lantai II

Nama	Jenis Dagangan	Jenis Tempat	Perolehan Tempat	Tarif Restribusi
Ibu Yuni	Pakaian	Kios	Cicilan	400/perhari
Ibu Pur	Pakaian	Kios	Kontan	1.000/perhari
Ibu Suwarni	Pakaian	Kios	Cicilan	500/perhari
Ibu Anik	Bumbu masak	Kios	Cicilan	400/perhari
Ibu Sangadah	Sembako	Kios	Cicilan	500/perhari

5. Pasar Klaten Lantai III

Nama	Jenis Dagangan	Jenis Tempat	Perolehan Tempat	Tarif Restribusi
Ibu Sutiyem	Grabatan	Kios	Cicilan	400/perhari
Ibu Pawiro Dikromo	Grabatan	Kios	Cicilan	300/perhari
Ibu Noto Diharjo	Grabatan	Kios	Cicilan	400/perhari

6. Pasar Buah Klaten

Nama	Jenis Dagangan	Jenis Tempat	Perolehan Tempat	Tarif Restribusi
Pak Udin	Buah	Kios	Cicilan	2.000/perhari

➤ **Jumlah Kios dan Pedagang (III)**

Sesuai dengan peta pasar yang operasional yang dikelola oleh Kantor
Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten tahun 2001.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XI. MASARAN																
47	MASARAN	Pemda	Cawas	Cawas	Ps. Ummi/Kambang	7	3	10	164	58	164	382	64	194	804	210.000.000
48	BANJUNGREJO	Pemda	Pakisari	Cawas	Pasar Umum	1	1	2	13	2	13	15	6	12	46	9.850.000
49	BARAN	Desa	Baran	Cawas	Pasar Umum	1	-	1	1	1	1	7	13	-	21	2.625.000
50	BALAK	Desa	Balak	Cawas	Pasar Umum	-	1	1	19	3	10	12	22	15	59	8.850.000
51	KALIMANGRU	Desa	Tugu	Cawas	Pasar Umum	1	-	1	7	3	-	-	-	-	0	1.050.000
				JUMLAH UNIT MASARAN		10	5	15	195	67	188	416	105	221	930	232.375.000
XII. SIDOHARJO																
52	SIDOHARJO	Pemda	Pusebin	Bayat	Ps. Ummi/Kambang	6	2	8	64	45	62	237	34	73	406	21.100.000
53	KARANGASEM	Pemda	Krakitan	Bayat	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	-	-	47	47	2.350.000
54	KARAKITAN/AYAT	Desa	Krakitan	Bayat	Pasar Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	125.000
55	PERUKAN	Desa	Dukuh	Bayat	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	20	-	-	20	700.000
56	BUNGGARANGAN	Pemda	Wiro	Bayat	Mato	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0	-
				JUMLAH UNIT SIDOHARJO		8	3	11	64	45	62	257	34	125	478	24.475.000
XIII. WEDI																
57	WEDI	Pemda	Kaliengguh	Wedi	Ps. Ummi/Lebahu	8	3	11	192	48	159	333	191	23	706	134.700.000
58	JUMBUNG	Pemda	Jumbung	Kaliyotes	Pasar Umum	1	1	2	23	10	19	74	43	-	136	10.875.000
59	SAWANGAJEJAN	Desa	Jumbung	Kaliyotes	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	-	-	33	33	1.320.000
				JUMLAH UNIT WEDI		10	4	14	215	58	178	407	234	56	873	146.895.000
XIV. KRAGUMAN																
60	KRAGUMAN	Pemda	Kraguman	Jugomalan	Ps. Ummi/Kambang	5	2	7	37	13	37	221	67	5	330	40.400.000
61	PULUHWATU	Pemda	Dernatejo	Karangongko	Pasar Umum	3	2	5	63	24	63	130	40	49	273	57.750.000
62	POKOH	Pemda	Karangluren	Kebanaran	Pasar Umum	1	-	1	8	4	8	20	12	10	50	395.000
63	DIMPYONGAN	Desa	Dempyongan	Jugomalan	Pasar Umum	1	1	2	10	5	10	24	26	20	80	7.500.000
64	SIGAWATI	Desa	Gondangan	Jugomalan	Pasar Umum	1	-	1	18	1	18	20	4	10	52	5.475.000
				JUMLAH UNIT KRAGUMAN		11	5	16	136	47	136	415	149	85	785	111.520.000
XV. PRAMBANAN																
65	PRAMBANAN	Pemda	Kebondalem	Prambanan	Pasar Heusan	4	2	6	39	6	35	18	73	11	137	15.450.000
66	TAJI	Pemda	Sangrehan	Prambanan	Pasar Umum	2	-	2	37	4	33	37	20	15	105	12.000.000
67	MANISRENGO	Pemda	Kranggen	Manisrengo	Pasar Umum	2	2	4	45	17	38	43	75	10	166	32.700.000
68	WANDUNGGAL	Pemda	Nangri	Manisrengo	Pasar Umum	1	-	1	2	-	-	11	-	-	11	823.000
69	INPRES BURUNG	Pemda	Kebondalem	Prambanan	Pasar Burung	-	1	1	4	2	-	6	-	-	6	200.000
70	MANDUNGAN	Desa	Randisari	Prambanan	Pasar Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	300.000
				JUMLAH UNIT PRAMBANAN		9	5	14	127	29	106	115	168	48	437	61.475.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XVI.	GANTIWARNO															
71	GANTIWARNO	Pemda	Jatine	Gantiwarno	Pasar Umum	2	-	2	-	4	-	25	21	6	52	2.080.000
72	PANGGIL	Pemda	Sawit	Gantiwarno	Pasar Umum	1	-	1	22	5	22	26	11	9	68	3.490.000
73	GIEMPEK	Pemda	Kadilanggen	Wadi	Pasar Umum	2	1	3	18	5	18	31	53	68	170	7.800.000
74	BALONG	Pemda	Kaligayam	Wedi	Pasar Umum	1	-	1	1	1	-	11	-	-	11	440.000
75	KEPPI	Desa	Ngandeng	Gantiwarno	Pasar Umum	-	1	1	1	-	-	-	-	69	69	2.760.000
76	MENGGAI	Desa	Katekan	Gantiwarno	Pasar Umum	-	-	-	1	1	-	-	-	79	79	3.160.000
77	KEDONGIRING	Desa	Ceporan	Gantiwarno	Pasar Umum	-	1	1	-	-	-	-	-	20	20	800.000
				JUMLAH UNIT GANTIWARNO		6	3	9	43	15	40	93	83	251	469	20.530.000
XVII	KEMBANG															
78	KEMBANG	Pemda	Kepuran	Kemalang	Pasar Umum	7	3	10	1	49	1	333	45	195	574	28.800.000
79	SURAWONO	Pemda	Tangkil	Kemalang	Pasar Umum	-	-	-	-	13	-	66	265	33	364	18.200.000
80	BUJUH	Desa	Bawakan	Manisrenggo	Pasar Umum	-	-	-	-	5	-	12	-	20	32	1.280.000
				JUMLAH UNIT KEMBANG		7	3	10	1	67	1	411	310	248	970	48.280.000
XVIII	BABAD															
81	BABAD	Pemda	Pulutan	Trucak	Pasar Umum	4	1	5	33	11	29	87	-	15	131	24.000.000
82	GAMONGAN	Desa	Gombang	Ciwas	Pasar Umum	1	-	1	8	3	7	20	34	45	106	14.125.000
83	TEMUWANGI	Desa	Temuwangi	Pedan	Pasar Umum	2	-	2	-	6	-	24	-	100	124	18.000.000
84	NGEBEG	Desa	Kupon	Ceper	Pasar Umum	-	-	-	-	4	-	33	-	17	59	7.500.000
85	JETO	Desa	Gaden	Trucak	Pasar Umum	1	-	1	20	3	19	32	-	16	67	11.000.000
86	JETIS	Desa	Wonosari	Trucak	Perkiosan	-	-	-	24	-	20	-	-	-	29	4.000.000
87	KIRINGAN	Desa	Sumber	Trucak	Pasar Umum	1	-	1	5	-	-	-	19	8	27	7.750.000
88	PAGER	Pemda	Mireng	Trucak	Perkiosan	-	-	-	6	-	6	-	-	-	6	1.200.000
				JUMLAH UNIT BABAD		9	1	10	96	27	81	196	53	201	531	88.175.000
				JUMLAH SELURUH UNIT		154	99	253	2326	858	2162	6217	2343	2796	13520	2.741.801.200

Klaten, 7 November 2001
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN KLATEN

AGUS YANUARI, SE.M.Si

Pembina

NIP. 500.082.624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI.	TULUNG															
25	JILIRIXI	Pemda	Jeblog	Karanganyon	Pasar Umum	2	2	4	21	23	19	104	77	-	209	10.950.000
26	NGENIXI	Pemda	Wunui	Tulung	Pasar Umum	1	1	2	18	7	9	69	-	-	78	3.640.000
27	KARANGAN	Pemda	Karangan	Karanganyon	Pasar Umum	2	1	3	29	30	14	86	24	36	130	6.040.000
28	KARANGANYON	Pemda	Karanganyon	Karanganyon	Pasar Kambang	-	-	-	18	-	18	-	-	-	14	8.840.000
29	COKRO KEMBANG	Desa	Dalemun	Tulung	Ps. Umum/Kambang	3	-	3	34	38	-	153	151	-	322	13.960.000
30	TULUNG	Desa	Pucang Miliro	Tulung	Pasar Umum	-	-	-	3	-	-	-	-	40	40	1.600.000
31	BORRO	Desa	Tulung	Tulung	Pasar Umum	-	-	-	-	18	-	45	-	-	45	1.650.000
VII.	DELANGGU			JUMLAH UNIT TULUNG		8	4	12	123	136	74	427	252	40	793	46.700.000
32	DELANGGU	Pemda	Sabrang	Delanggu	Pasar Umum	7	4	11	153	19	121	629	26	170	946	242.550.000
33	TIGALONIXI	Pemda	Wadung Getus	Wonosari	Pasar Umum	3	1	4	50	16	47	123	21	33	224	40.650.000
34	GLAGAHWANGI	Desa	Glagah Wangi	Klambato	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-
35	NGARAN	Desa	Kamotan	Ceper	Pasar Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
36	KLEPU	Perantaraan	Klepu	Ceper	Pasar Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
VIII.	TANJUNG			JUMLAH UNIT DELANGGU		11	5	16	203	35	168	752	47	203	1170	280.200.000
37	TANJUNU	Pemda	Dekaplat	Juwaring	Pasar Umum	3	2	5	73	34	71	203	-	6	280	21.100.000
38	JUWIRING	Pemda	Budarejo	Juwaring	Pasar Umum	1	1	2	37	10	73	73	9	-	155	16.600.000
39	PANJANGAN	Pemda	Gondangarsi	Juwaring	Pasar Umum	1	1	2	23	4	22	56	5	33	116	6.620.000
40	BARAJAN	Desa	Teloyo	Wonosari	Pasar Umum	1	-	1	-	13	-	89	16	15	120	4.800.000
41	CARIKAN	Desa	Carikan	Juwaring	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	-	-	62	62	2.480.000
IX.	MINGGIRAN			JUMLAH UNIT TANJUNG		4	11	11	133	61	166	421	30	116	733	51.600.000
42	MINGGIRAN	Pemda	Puputan	Karangdowo	Pasar Umum	3	1	4	46	26	40	70	10	98	218	15.308.000
43	SOKA	Desa	Soka	Karangdowo	Pasar Umum	-	1	1	3	-	3	-	3	64	70	3.663.600
44	KARANGTALUN	Desa	Karangtalun	Karangdowo	Pasar Umum	1	-	1	-	5	-	28	21	21	70	3.986.100
45	POKIS	Desa	Cawas	Karangdowo	Pasar Umum	1	-	1	23	4	12	48	48	68	176	3.762.500
X.46	PEDAN			JUMLAH UNIT MINGGIRAN		5	2	7	72	35	55	146	82	251	534	26.720.200
		Pemda	Salyan	Pedan	Ps. Umum/tevan	11	3	14	224	49	168	603	78	379	1228	290.200.000

**DATA PASAR YANG OPERASIONAL
YANG DIKELOLA OLEH KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2001**

NO	UNIT/PASAR	STATUS TANAH	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	OPERASIONAL	PEGAWAJ			JUMLAH KIOS		JUMLAH LOTS		JUMLAH PEDAGANG (orang)		JUMLAH SELURUH PEDAGANG	KETURANGAN (OM/MT)
						PNS	KON TRAK	JUMLAH	KIOS	LOTS	DALAM	LUAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	PLASA KLATEN	Pemda	Kabupaten	Klaten Tengah	Pertanian	2	20	22	30	-	24	-	8	8	40	12.000.000
II.2	KLATEN III LANTAI	Pemda	Kabupaten	Klaten Tengah	Pasar Umum	9	21	30	456	81	327	416	77	219	1039	540.600.000
III	MLINJON															
3	MLINJON	Pemda	Tonggalan	Klaten Utara	Pasar Umum	3	-	3	29	6	20	45	5	-	70	5.750.000
4	NGEPOS	Pemda	Klaten	Klaten Tengah	Pasar Umum	-	1	1	-	-	-	33	-	-	33	4.125.000
5	PASAR BUAH/JL. BALI	Pemda	Kabupaten	Klaten Tengah	Pasar Buah	-	1	1	-	-	-	-	-	30	30	5.350.000
6	GUNUNGAN	Pemda	Barang Lor	Klaten Utara	Pasar Burang	1	1	2	29	9	20	33	9	6	68	9.000.000
7	PEMBRONJEWAN	Pemda	Belang Wetan	Klaten Utara	Pasar Kambing	1	1	2	5	-	5	12	42	11	79	6.500.000
8	PEMBRONJUM M	Pemda	Belang Wetan	Klaten Utara	Pasar Umum	1	1	2	15	4	14	24	12	31	81	9.800.000
9	SRAGO	Desa	Mojukan	Klaten Tengah	Pasar Umum	2	1	3	84	18	45	111	20	34	216	17.550.000
10	BARENG	Desa	Barang Lor	Klaten Utara	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	-	20	-	20	1.000.000
11	GAYAMPRII	Desa	Gayampri	Klaten Selatan	Pasar Umum	1	-	1	19	-	19	-	78	-	97	5.800.000
12	BENDOKANTUNGAN	Desa	Somberejo	Klaten Selatan	Pasar Umum	-	1	1	7	4	7	16	4	-	27	2.050.000
				JUMLAH UNIT MLINJON		10	7	17	120	41	130	274	196	124	724	620.025.000
IV	KLATEN II															
13	TUTUKAN	Pemda	Ngawen	Ngawen	Pasar Umum	2	1	3	27	4	24	18	24	58	124	7.600.000
14	GENTONGAN	Laksa	Gembelan	Kalibotes	Pasar Umum	6	-	6	97	54	90	216	17	50	373	20.320.000
15	SENGGRI	Desa	Drono	Ngawen	Pasar Umum	1	-	1	-	6	21	40	-	27	88	6.060.000
16	MAYURGAN	Desa	Mayungan	Ngawen	Pasar Umum	1	-	1	-	3	-	38	-	21	59	3.000.000
				JUMLAH UNIT KLATEN II		10	1	11	124	67	135	312	41	156	644	36.940.000
V	JATINOM															
17	JATINOM	Pemda	Jatinom	Jatinom	Ps. Umum/Hewan	5	1	6	69	20	57	269	212	25	563	64.600.000
18	GABUS	Pemda	Krajan	Jatinom	Pasar Umum	3	2	5	80	12	66	98	184	40	388	12.576.000
19	JOLUTUNJO	Desa	Jambayan	Karanganyem	Pasar Umum	1	-	1	-	4	-	26	-	-	29	893.000
20	NGEMPLAK	Desa	Gligali	Jatinom	Pasar Umum	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	424.000
21	POMALI	Desa	Panah	Tulung	Pasar Umum	-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	1.443.000
22	MUNDU	Desa	Murjo	Jatinom	Pasar Umum	1	-	1	-	-	-	37	-	-	37	16.683.500
23	KLODRAN	Desa	Kayumamis	Jatinom	Pasar Umum	-	-	-	-	3	-	17	-	-	17	1.608.500
24	BONYOKAN	Desa	Bonyokan	Jatinom	Pasar Umum	1	-	1	-	2	-	28	-	-	28	1.821.000
				JUMLAH UNIT JATINOM		11	3	14	149	41	123	566	396	63	1140	100.051.000

